

PANDEMI COVID-19

Perspektif Hubungan Internasional



Erna Kurniawati, M.Si
Ludiro Madu, M.Si

Pandemi COVID-19

Perspektif Hubungan

Internasional

Penulis :

Erna Kurniawati, M.Si

Ludiro Madu, M.Si

Penerbit

LPPM UPN Veteran Yogyakarta

Pandemi COVID-19

Perspektif Hubungan Internasional

Erna Kurniawati, M.Si

Ludiro Madu, M.Si

Copyright© Erna Kurniawati, M.Si, Ludiro Madu, M.Si

2021

Hak cipta dilindungi oleh undang undang

Cetakan Pertama, 2021

ISBN : 978-623-5539-79-9

Diterbitkan oleh:

LPPM UPN Veteran Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur, Yogyakarta 55283

Telepon (0274) 486188,486733, ext 154

Fax (0274) 486400

KATA PENGANTAR

Pandemi COVID-19 telah memberi tantangan baru bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dari berbagai disiplin Ilmu, termasuk diantaranya Ilmu Hubungan Internasional. Perkembangan Ilmu Hubungan Internasional yang selama ini ditandai 4 (empat) transformasi, yakni era Pasca Perang Dunia I, era pasca Perang Dunia II, era Pasca Perang Dingin, serta era pasca Peristiwa serangan terorisme di Menara kembar World Trade Center (WTC). Dahsyatnya perubahan fenomena global akibat Pandemi COVID-19 diyakini akan menjadi transformasi ke lima perkembangan Ilmu Hubungan Internasional akibat pandemi ini. Hal ini dilatarbelakangi berbagai kenyataan bahwa pandemi COVID-19 telah merubah berbagai fenomena dalam Hubungan Internasional, diantaranya munculnya fenomena dimana negara negara banyak menutup perbatasan untuk mencegah penyebaran virus corona 2 (SARS-CoV-2) penyebab COVID-19, yang mana fenomena tersebut menjadi paradoks dari semangat Globalisasi. Dilain pihak, upaya mendapatkan vaksin sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pandemi, memaksa negara negara untuk meningkatkan Kerjasama internasional, mengingat demand dan supply vaksin yang tidak seimbang, sehingga perlu pengaturan pengaturan 'extra ordinary' untuk pemerataan akses bagi negara kaya dan negara Berkembang atau miskin. Fenomena diatas tentu membawa tantangan baru bagi studi mengenai Kerjasama internasional, termasuk diantaranya diplomasi Kesehatan.

Terbitnya buku Pandemi COVID-19 : Perspektif Hubungan Internasional ini diharapkan akan dapat membantu mahasiswa untuk

lebih memahami Pandemi COVID-19 dari berbagai perspektif Hubungan Internasional. Buku ini diharap akan memperkaya bacaan dan meningkatkan pemahaman mengenai Pandemi COVID-19, sehingga mahasiswa tertarik dan terdorong untuk melakukan penelitian, terutama untuk menulis tugas akhir (skripsi) mengenai pandemi COVID-19. Untuk itu, buku ini memberikan pengetahuan mengenai berbagai perspektif dasar dalam ilmu hubungan internasional. Dari perspektif keamanan, buku ini memberi pemahaman keamanan yang maknanya lebih luas, yakni tidak hanya mencakup keamanan militer, seperti selama ini banyak dipahami, namun mencakup pemahaman keamanan lebih luas, diantaranya keamanan manusia (*human security*), keamanan Kesehatan (*health security*). Buku ini juga memberi pemahaman dari perspektif Liberalis, bahwa mudahnya dan masifnya persebaran virus SARS-COV2 penyebab COVID-19 telah menyebabkan epidemi COVID-19 menjadi pandemi yang berskala global, sehingga tidak dapat dihindari bahwa penanganannya memerlukan Kerjasama internasional. Untuk meningkatkan pemahaman penanganan pandemic COVID-19, pada Bab akhir buku ini penulis membahas dengan studi kasus di beberapa negara.

Besar harapan kami, pemahaman mahasiswa mengenai pandemi COVID-19 dari Perspektif Hubungan Internasional meningkat, sehingga mendorong mereka melakukan penelitian dan membuat tugas akhir dengan topik diatas, sehingga diharap juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tulisannya dalam sebuah skripsi atau jurnal ilmiah.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata pengantar	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi
BAB I Epidemi, Endemi dan Pandemi Global	1
BAB II PANDEMI COVID-19: Perspektif <i>Human Security</i>	10
BAB III PANDEMI COVID -19 : Perspektif Keamanan Kesehatan (<i>Health Security</i>)	20
BAB IV Pandemi COVID-19: Perspektif Liberalis	26
BAB V Diplomasi Kesehatan dan Pandemi COVID 19: Pengalaman Indonesia	34
DAFTAR PUSTAKA	49
BIODATA PENULIS	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Fase Pandemi	6
Gambar 2	Human Security Menurut UNDP	12
Gambar 3	Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB dalam konflik di Rwanda 1995	14
Gambar 4	Global Humanitarian Overview-Message by Secretary General Antònio Guterres.....	19
Gambar 5	3 Fokus Utama Pemerintah Menangani Covid-19.....	25
Gambar 6	Keterkaitan Pandemi Global dan Kerjasama Internasional	31
Gambar 7	Menlu Retno Marsudi Memberi Keterangan Pemenuhan Vaksin di GSP	36
Gambar 8	Daftar Negara yang Layak mendapat bantuan Vaksin COVID-19 dari COVAX AMC	43
Gambar 9	Twitter Menteri Luar negeri Retno Marsudi setelah terpilih sebagai co chairman COVAX AMC	44
Gambar 10	Vaksin yang sudah dikirim ke Indonesia	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan Kesehatan Global dan Kesehatan Publik	30
---------	---	----

BAB I

EPIDEMI, ENDEMI DAN PANDEMI GLOBAL

“This is not just a public health crisis, it is a crisis that will touch every sector,”. “So every sector and every individual must be involved in the fights.” (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO director-general)

Wacana pandemi kembali mengemuka ketika pada akhir tahun 2019 terjadi wabah penyakit yang disebabkan virus corona. Corona jenis baru yang pertama ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China ini kemudian diberi nama *Severe Accute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Corona Virus Disease-19* (COVID-19). Persebaran virus corona ke berbagai belahan dunia berlangsung sangat massif dan telah mengakibatkan banyak korban, baik yang terinfeksi dan dapat disembuhkan, maupun meninggal dunia. Kondisi ini menyebabkan banyak dorongan agar badan dunia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang menangani masalah Kesehatan, World Health Organization (WHO) untuk segera mengumumkan COVID-19 berubah status dari epidemi menjadi pandemi. Lantas apakah yang dimaksud dengan pandemi, dan apa bedanya dengan epidemi dan endemi ?

Definisi Pandemi

Terdapat beberapa definisi Pandemi. Merriam Webster mendefinisikan pandemi kedalam 2 (dua) definisi, dimana yang satu spesifik merujuk pada persebaran penyakit, dan yang kedua pengertian lebih luas, namun kesamaan merujuk pada sifat persebarannya. Definisi Pandemi menurut Webster :1) wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas (seperti beberapa negara atau benua) dan biasanya mempengaruhi sebagian besar populasi: wabah pandemi suatu penyakit pandemi global; 2) wabah atau produk dari penyebaran, pertumbuhan, atau perkembangan yang cepat secara tiba tiba.¹ Untuk pengertian kedua ini, Webster antara lain memberikan contoh dengan kalimat yang dikutip dari Roger Griffith : kita telah membahas pandemi rasisme selama berabad abad. Sedangkan menurut Doshi, selama ini pandemi didefinisikan sebagai : 1) epidemi yang terjadi di seluruh dunia, atau di wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional dan biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang; 2). Definisi klasik tidak memasukkan apapun tentang kekebalan populasi, virologi atau keparahan penyakit. Dengan definisi ini, pandemi dapat dikatakan terjadi setiap tahun di setiap belahan selatan dan utara yang beriklim sedang, mengingat epidemi musiman melintasi batas

¹ (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/pandemic>, diakses 27 April 2021).

internasional dan mempengaruhi sejumlah besar orang. Namun, epidemi musiman tidak dianggap sebagai pandemi.²

Dengan kata lain, menurut Webster, epidemi didefinisikan sebagai “wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dan mempengaruhi banyak individu pada waktu yang sama.” Pandemi adalah jenis epidemi (yang memiliki jangkauan dan cakupan yang lebih besar), wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas dan mempengaruhi proporsi populasi yang sangat tinggi. Sementara pandemi dapat dicirikan sebagai jenis epidemi.³

Sedangkan menurut World Health Organization (WHO), pandemi pada dasarnya adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. WHO memberikan contoh pada kasus influenza. Epidemi influenza berubah menjadi pandemi ketika virus influenza (varian) baru muncul dan menyebar ke seluruh dunia, dan kebanyakan orang tidak memiliki kekebalan. Baik pada influenza musiman maupun pandemi influenza H1N1 keduanya memiliki kemiripan, yakni keduanya dapat menyerang ke semua kelompok umur, dan dapat sembuh dengan sendirinya. Pada orang dengan penyakit kronik, influenza dapat menyebabkan kematian. Namun pada pandemi, influenza dapat lebih banyak menyebabkan kematian.

² Heath Kelly, The classical definition of a pandemic is not elusive, *Bulletin of the World Health Organization* 2011;89:540-541. doi: 10.2471/BLT.11.088815), <https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-088815/en/#:~:text=A%20pandemic%20is%20defined%20as,are%20not%20considered%20pandemics.>, diakses 27 April 2021

³ <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/epidemic-vs-pandemic-difference>

Center for Disease Control and Prevention (CDC) menjelaskan terjadinya epidemi dengan membedakan endemi, pandemi dan epidemi berdasar level penyakit. Menurut CDC, Endemik merujuk pada jumlah penyakit tertentu yang biasanya muncul dalam suatu komunitas, yang kemudian disebut sebagai dasar atau tingkat endemik penyakit tersebut. Atau dengan kata lain, istilah endemik mengacu pada keberadaan konstan dan / atau prevalensi yang biasa dari suatu penyakit atau penyebab infeksi dalam suatu populasi pada suatu wilayah geografis. Sedangkan epidemi merupakan penyakit yang muncul pada wilayah geografis tertentu, dan akan bertahan (tetap ada) di wilayah tersebut. Sama halnya CDC, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mendefinisikan endemik sebagai penyakit yang muncul pada wilayah tertentu.

Terkait persebaran virus corona, ada prediksi bahwa ke depan pandemi akan berubah menjadi endemik, artinya, virus ini diduga akan tetap ada di beberapa kawasan tertentu. Hal ini tampak dari pernyataan Profesor David Heymann, Ketua Kelompok Penasehat Strategis dan Tehnis untuk Penyakit Infeksi WHO

The “destiny “ of the virus is to become endemic, even as vaccines begin to be rolled out in the US and UK (“ Virus (corona) ditakdirkan akan menjadi endemik, bahkan saat vaksin mulai diluncurkan di Amerika Serikat dan Inggris).⁴

⁴ WHO warns Covid-19 pandemic is not necessarily the big one, <https://www.theguardian.com/world/2020/dec/29/who-warns-covid-19-pandemic-is-not-necessarily-the-big-one>, diakses 6 Mei 2021

Indonesia juga mengakui bahwa pandemi COVID-19 ini pada akhirnya akan menjadi endemi. Ini antara lain tampak pada pernyataan Presiden Joko Widodo Ketika meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 , Bantul, Yogyakarta, pada 10 September 2021 :

“Kita harus mulai menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi dan juga mulai belajar hidup bersama dengan Covid,”⁵

Menurut CDC, Epidemi mengacu pada peningkatan, seringkali secara tiba-tiba, dalam jumlah kasus penyakit di atas yang biasanya diharapkan pada populasi di daerah itu. Istilah Wabah (plague) juga sering didefinisikan sama dengan epidemi, tetapi sering digunakan untuk wilayah geografis yang lebih terbatas. Ketiga istilah diatas juga terkait erat dengan istilah klaster (cluster). CDC mendefinisikan Cluster yang mengacu pada kumpulan kasus yang dikelompokkan di tempat dan waktu yang diduga lebih besar dari jumlah yang diharapkan, meskipun jumlah yang diharapkan mungkin tidak diketahui. Sementara Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi banyak orang.

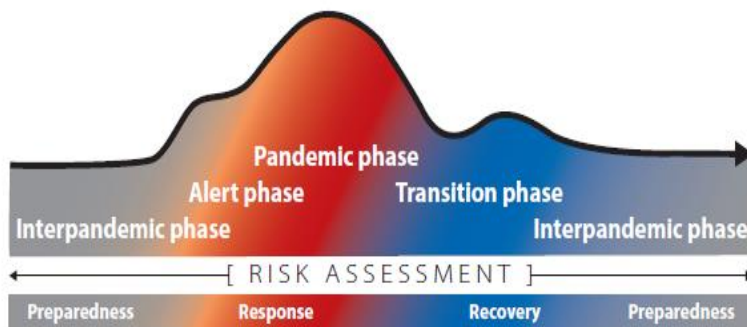
Dengan merujuk pada berbagai definisi diatas, maka dapat diambil benang merahnya, bahwa pandemi merujuk pada persebaran penyakit ke berbagai kawasan dunia dan dalam waktu yang bersamaan. Beberapa penyakit yang pernah dinyatakan sebagai pandemi diantaranya flu Spanyol (1918), kolera, SARS, Ebola, dan HIV/AIDS.

⁵ Presiden Jokowi Siapkan Transisi dari Pandemi ke Endemi, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/president-jokowi-siapkan-transisi-dari-pandemi-ke-endemi/>, diakses 10 September 2021

Untuk lebih jelasnya, CDC menjelaskan proses menjadi pandemi, dengan gambar 1 berikut ⁶

Gambar 1
Fase Pandemi

Figure 1. The continuum of pandemic phases³



³ This continuum is according to a "global average" of cases, over time, based on continued risk assessment and consistent with the broader emergency risk management continuum.

Gambar 1 menggambarkan penilaian risiko yang tumpang tindih dan kontinum fase pandemi global.

Gambar 1 menunjukkan "Continuum of Pandemic Phases" ⁷dari Organisasi Kesehatan Dunia, yang ditunjukkan dengan kurva distribusi dari rata-rata

⁶ Lesson 1: Intruduction to Epidemiology: Section 11: Epidemic Disease Occurrence

<https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html>, diakses 4/5/2021

⁷ Continuum (kontinum) didefinisikan sebagai keseluruhan koheren yang menggambarkan fase dari ujung ke ujung (webster dictionary,

kasus pandemi global dari waktu ke waktu berdasarkan penilaian risiko pandemi lanjutan. Dari kiri ke kanan, kurva menunjukkan kenaikan dan penurunan rata-rata global kasus pandemi di empat fase pandemi. Empat fase tersebut meliputi "interpandemi", "waspada", "pandemi", dan "transisi". Fase dalam kontinum juga tumpang tindih dengan tahapan penilaian risiko pandemi. Dari kiri ke kanan, tiga tahap penilaian risiko mencakup "kesiapan", "respons", dan "pemulihan". Dimulai dari paling kiri dari kontinum, rata-rata kasus global paling rendah selama fase "interpandemi", yaitu selama tahap penilaian risiko "kesiapan". Rata-rata kasus global meningkat pesat melalui fase "waspada" dan "pandemi", dengan rata-rata kasus global terbesar terjadi pada fase "pandemi". Kedua fase ini tumpang tindih dengan tahap "respons" dari penilaian risiko. Rata-rata kasus global sangat menurun saat memasuki fase "transisi", yang tumpang tindih dengan tahap "pemulihan" dari penilaian risiko. Gambar tersebut menunjukkan sedikit peningkatan dari rata-rata kasus global selama fase "transisi", yang menunjukkan kemungkinan kasus pandemi gelombang kedua. Rata-rata kasus global menurun hingga mencapai rata-rata kasus global asli, kembali ke fase "interpandemi", yang tumpang tindih dengan tahap penilaian risiko "kesiapan".⁸

Dengan kata lain, epidemi mengacu pada peningkatan penyebaran penyakit dalam komunitas tertentu. Sebaliknya, WHO mendefinisikan pandemi sebagai penyebaran global penyakit baru, meskipun ambang batas spesifik untuk

https://www.merriam-webster.com/dictionary/continuum?utm_campaign=sd&utm_medium=serp&utm_source=jsonld

⁸ (<https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/planning-preparedness/global-planning-508.html>), diakses 28 April 2021

memenuhi kriteria tersebut tidak jelas. Istilah tersebut sering digunakan pada ditemukannya jenis influenza baru. Untuk situasi ini CDC menyatakan bahwa epidemi digunakan ketika virus “dapat menginfeksi orang dengan mudah dan menyebar dari orang ke orang dengan cara yang efisien dan berkelanjutan” di berbagai wilayah. Dengan demikian, hal ini mengacu pada penyebaran penyakit, bukan keparahan penyakit yang ditimbulkannya.

Kasus COVID-19 dari epidemi ke Pandemi

Pada kasus pemaparan virus corona SARS-COV2, penyebab penyakit COVID-19, sejak awal dilaporkan secara resmi oleh otoritas Kesehatan Wuhan, China akhir Desember 2019, dan terus menyebar ke berbagai kawasan dunia dan di berbagai komunitas, menyebabkan banyak kematian, telah membuat banyak pihak mendorong WHO agar meningkatkan ‘status’ menjadi pandemi. Akhirnya sekitar 3 bulan kemudian, tepatnya pada 12 Maret 2021, WHO melalui Direktur Jenderal Tedros Ahanom Ghebreyesus secara resmi memutuskan dan menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Tedros menyampaikan hal ini setelah merujuk pada 118.000 orang yang terinfeksi virus corona di lebih dari 180 negara dan wilayah, 4291 orang meninggal dan kemungkinan penyebaran lebih lanjut. Dalam konferensi pers tersebut Tedros juga menyatakan :

“in the days and weeks, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher” (dalam

beberapa hari atau pekan mendatang, kita akan melihat peningkatan, jumlah kasus, dan kematian yang jauh lebih tinggi”).⁹

Selama ini WHO banyak dikritik karena tidak segera mengumumkan merebaknya virus corona sebagai pandemi. ‘Kelambanan’ WHO diduga karena kekhawatiran berdampak pada sektor politik dan ekonomi global.

Pada kenyataannya, sebelum secara resmi menyatakan sebagai pandemi global, WHO memilih menggunakan diksi yang berbeda untuk menghindari diksi pandemi. Hal ini tampak ketika bulan Januari 2020, WHO menyatakan persebaran virus corona yang menjadi penyebab penyakit COVID-19 sebagai kejadian luar biasa, ketimbang sebagai pandemi global, seperti pada pernyataan berikut : “extraordinary event that constitute(s) to a public health risk to other states through the international spread of disease” (kejadian luar biasa bagi resiko Kesehatan masyarakat gobal melalui persebaran penyakit internasional).¹⁰

Dari contoh diatas, tampak bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menjadi rujukan negara negara di dunia dalam penanganan pandemi COVID-19 bahkan memerlukan waktu cukup lama, sekitar 3 bulan, untuk mengumumkan dari epidemi menjadi pandemi, dengan berbagai pertimbangan.

⁹ <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, diakses 6 Juli 2021

¹⁰ <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/>, diakses 4 Juli 2021.

BAB II

PANDEMI COVID-19 : PERSPEKTIF *HUMAN SECURITY*

*Building upon successful epidemic prevention efforts, we will lead international cooperation in the post-COVID-19 era while placing “human security” at the center. (“Special Address by President Moon Jae-in to Mark Three Years in Office”)*¹¹

Sejak berakhirnya era Perang Dingin, konsep keamanan telah mengalami pergeseran. Jika semula definisi keamanan, hanya merujuk pada negara aman dari kemungkinan dari ancaman militer, atau yang dikenal dengan Keamanan Tradisional. Akhir akhir ini konsep keamanan menjadi lebih luas, yang kemudian dikenal keamanan non tradisional dengan mencakup berbagai isu, diantaranya keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan sosial, yang sama penting dengan keamanan militer.

Barry Buzan, misalnya menyatakan bahwa : that security was not just about states, but related to human collectivities.¹²

Pernyataan Barry Buzan, menunjukkan bahwa mendefinisikan negara aman juga harus memperhatikan keamanan masyarakat sebagai satu kesatuan yang membentuk negara tsb.

¹¹ <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2020/09/United-Nations-Human-Security-Newsletter-Summer-2020-min.pdf>

¹² Paul D Williams, *Security Studies: An Introduction*, Routledge London & New York, 2008, hal 3.

Hal ini juga semakin memberi kesadaran, bahwa banyak isu-isu lain, diluar isu militer yang krusial, sehingga isu keamanan telah bergeser dari keamanan militer menjadi keamanan manusia (*human security*).

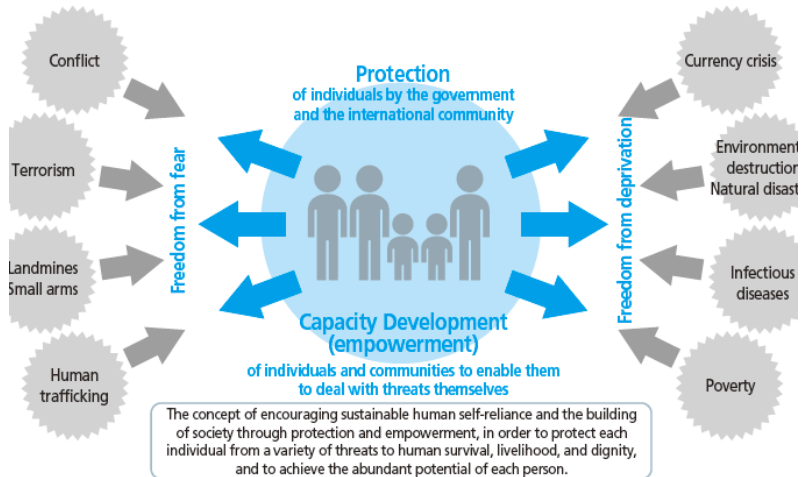
Prinsip dasar dari konsep *human security* adalah lebih menitikberatkan pada kesejahteraan individu dan pada keamanan masyarakat, sehingga pemahaman keamanan nasional yang komprehensif pada umumnya lalu disertai dengan tuntutan untuk mengedepankan keamanan manusia (*human security*). Asumsinya adalah bahwa ancaman (*threat*) yang dapat membahayakan keutuhan negara, bukan hanya isu-isu militer saja, tetapi isu-isu non militer juga, dan ancaman tersebut juga dapat mengancam individu-individu yang berdiam di sebuah negara.

Definisi sumber ancaman (*origin of threat*) yang berbeda akan memberi implikasi berbeda terhadap respons. Misal, jika negara mendefinisikan negara aman dari kemungkinan ancaman militer dari negara lain, maka responsnya dengan memperkuat kemampuan militer untuk setidaknya mempunyai kemampuan menangkal kemungkinan serangan dari negara lain (*defensif*). Respons yang diperlukan akan berbeda, jika negara mendefinisikan negara aman dari perspektif *human security*, termasuk diantaranya keamanan kesehatan (*health security*) sebagai bagian dari keamanan manusia (*human security*), menurut UNDP (*United Nations Development Programme*).

Gambar 3 berikut menunjukkan *Human Security* menurut UNDP yang mencakup bebas dari rasa takut terhadap konflik, ranjau darat, terorisme, penyelundupan manusia. *Human security* juga mencakup kebebasan dari deprivasi (akibat) krisis keuangan, kerusakan lingkungan karena bencana alam, penyakit infeksi dan kemiskinan.

Gambar 2

Human Security menurut UNDP



The concept of securing Human Security,

https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2011/html/honbun/b2/s2_1.html

Fen Osler Hampson menyebutkan, setidaknya ada 3 (tiga) perspektif menyangkut konsep keamanan manusia (*human security*).¹³

Pandangan *pertama*, *human security* merujuk pada asumsi dasar liberalis mengenai hak untuk *'life, liberty and pursuit of happiness*. Oleh karena itu masyarakat internasional harus bertanggungjawab untuk melindungi dan mendorong terwujudnya hak-hak tersebut. Jadi, ancaman keamanan yang tertuju langsung terhadap individu diartikan melalui konsep *human security*,

¹³ Fen Osler Hampson, "Human Security", dalam Paul D Williams (ed), *Security Studies: An Introduction*, USA & Canada: Routledge, 2008, hal 230-231

dengan alasan bahwa objek dari keamanan seharusnya bukan hanya negara dan kelompok-kelompok di bawah naungan negara, tetapi juga orang-orang secara individu di mana mereka sebagai aktor yang membentuk institusi kenegaraan itu.

Pandangan *kedua*, sering pula disebut pandangan *humanizing security* (memanusiawikan keamanan). Perspektif ini memandang *human security* sebagai *humanitarian* (kemanusiaan), yang dilakukan secara struktural, seperti upaya-upaya internasional untuk memperkuat hukum internasional, khususnya terkait *genocide*, kriminal perang dan pemusnahan senjata, terutama senjata terlarang bagi sipil dan non kombatan.

Cara pandang kedua inilah yang kemudian menjadi dasar dari intervensi kemanusiaan yang ditujukan untuk meningkatkan standard hidup pengungsi dan siapapun yang terdampak konflik di komunitas atau tempat dimana mereka tinggal.

Cara pandang kedua ini juga menitikberatkan kepada konsep *human security* dalam kerangka kemanusiaan dimana keselamatan masyarakat, yang dapat pula diartikan sebagai bebas dari rasa takut, merupakan tujuan utama dibalik intervensi internasional. Konsepsi ini pula yang memandang aksi terorisme sebagai salah satu ancaman yang utama terhadap *human security*.

Jika dibandingkan dengan perspektif pertama, maka cara pandang kedua ini lebih sempit, karena lebih memfokuskan pada pembangunan manusia dengan keamanan manusia sebagai upaya melindungi individu dari perilaku kekerasan. Perspektif kedua ini juga memandang perlunya tindakan darurat

dalam menangani konflik yang menimbulkan banyak korban jiwa dalam konflik yang melibatkan kemanusiaan.

Meski masih menimbulkan pro-kontra kapan saatnya Badan Dunia, seperti PBB harus melakukan intervensi (atas nama) kemanusiaan jika terjadi konflik di sebuah negara, namun PBB sudah banyak melakukan program intervensi kemanusiaan. Gambar 3 di bawah adalah contoh intervensi kemanusiaan PBB di Rwanda, ketika terjadi konflik panjang antara suku Tutsi dan Hutu. Pada gambar tampak seorang tentara Australia yang tergabung dalam Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB membawa bayi Hutu yang ibunya terbunuh dalam konflik Rwanda 1995.

Gambar 3

Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB dalam konflik di Rwanda 1995



Sumber foto : Yes, the UN has a duty to intervene. But, when, where and how? <https://www.theguardian.com/world/2013/may/04/un-syria-duty-to-intervene>, diakses 2 September 2021

Pandangan ketiga. Berbeda dengan kedua pandangan diatas, pandangan *ketiga* berupaya memperluas definisi *human security*. Pandangan ketiga ini lebih dilihat dari perspektif Konstruktivis yang memandang keamanan manusia sebagai suatu konstruksi sosial, atau yang dikonstruksikan, termasuk didalamnya: keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan sosial dan bentuk –bentuk lain yang merugikan keseluruhan hidup dan kesejahteraan individu.

Pendekatan ketiga sering pula diartikan sebagai pembangunan manusia yang berkelanjutan (*sustainable development*) dilihat dari sudut pandang *human security*. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif Liberalis, pendekatan ketiga ini berkaitan dengan liberalisme institusional, dimana institusi internasional membantu dalam mendorong kerjasama antara negara dan membantu menghilangkan rasa saling tidak percaya (*distrust*) antara negara, serta mengurangi kekhawatiran negara terkait cara pandang klasik tentang sistem internasional yang anarki.

Konsep *human security* dalam arti luas ini awalnya berasal dari *policy statement* Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada pertengahan 1990an.

Dalam dokumen tersebut, *human security* dideskripsikan sebagai ...condition where people are given relief from the traumas that besiege human development (kondisi dimana manusia dibebaskan dari trauma yang menderanya).

Policy statement tersebut lalu dipertegas di *United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Report 1994*, dimana berdasar pandangan UNDP ini, lalu *Human security* diartikan sebagai : *pertama*, aman

dari ancaman kelaparan yang parah, penyakit dan represi. *Kedua*, perlindungan dari gangguan mendadak dan melukai dalam pola kehidupan sehari-hari –baik di rumah, dalam pekerjaan, maupun dalam masyarakat.¹⁴ Dalam konsep human security tersebut, UNDP memberi penekanan pada 2 komponen utama, yakni “freedom from fear” dan “freedom from want”. Kebebasan yang diadopsi dari preamble Declarations of Human Right ini, lalu ditambah dengan komponen *to live in dignity* pada tahun 1990an.

UNDP tahun 1994, menyatakan bahwa konsep keamanan selama ini secara sempit diinterpretasikan sebagai : keamanan wilayah dari agresi eksternal, atau dalam politik luar negeri sebagai perlindungan keamanan nasional, sebagai keamanan global dari ancaman *holocaust* nuklir. Jadi lebih terkait pada negara (*nation state*), daripada masyarakat. Pada akhirnya *human security* adalah soal tidak adanya anak yang meninggal, tidak adanya penyakit yang menyebar, tidak adanya kehilangan pekerjaan, tidak adanya ketegangan etnik yang meledak menjadi kekerasan. Keamanan manusia tidak berpusat pada persenjataan- terkait dengan kehidupan manusia dan harga diri (*dignity*).¹⁵

Dari pernyataan diatas, tampak ada upaya UNDP untuk melakukan ‘rethinking’ tentang definisi keamanan, terutama keamanan manusia. Secara implisit UNDP menyebut bahwa keamanan manusia mencakup tidak hanya military

¹⁴ Disarikan dari Allan Collins, *ibid*

¹⁵ UNDP, 1994, hal 22, dalam “Human Security” Gunhild Hoogensen Gjør, dalam Paul D Williams & Matt McDonald(eds), *Security Studies An Introduction*, 3rd ed, Roudledge, London & New York, 2018, hal 221.

security, tetapi juga termasuk diantaranya *personal security*, *health security* dan *societal security*.

Adapun gagasan yang mendasari pendekatan UNDP ini adalah adanya gagasan bahwa manusia mempunyai hak untuk hidup bebas dan terhormat, bebas dari kemiskinan dan keputusasaan dengan peluang yang sama untuk menikmati hak hak mereka dan dalam mengembangkan potensi diri.

Masih menurut UNDP, bahwa keamanan manusia (*human security*) terkait erat dengan pengalaman manusia menyangkut persoalan keamanan dan ketidakamanan. UNDP report 1994 menggarisbawahi empat (4) karakteristik keamanan manusia. *Pertama*, *human security* bersifat universal, dalam arti berlaku bagi semua manusia, kaya miskin, kawasan utara maupun kawasan selatan. *Kedua*, *human security* bersifat interdependen, yang berarti bahwa ketidakamanan manusia baik yang berasal lingkungan lokal maupun lintas batas negara dan berimplikasi global. *Ketiga*, upaya pencegahan atau imperatif menunjukkan pentingnya mengimplementasikan ukuran kesehatan dasar, misalnya, sehingga rasa ketidakamanan bisa diminimalisir. Karakteristik *keempat*, bahwa *human security* yang berpusat pada manusia (*people centred*) menjadi sangat revolusioner, mengingat meningkatnya dominasi konsep keamanan berbasis negara pada abad ke 19 dan 20.¹⁶

Dengan karakteristik tersebut, jelaslah bahwa *health security* merupakan bagian dari *human security* , dan bersifat interdependen (saling mempengaruhi), dan diakui bisa berdampak global.

¹⁶ Gunhild, *ibid*, hal 224

Lebih lanjut, dalam UNDP Development Report, UNDP lalu membuat 7 indikator keamanan, yakni: 1) *economic security* 2) *food security*; 3) ***health security***; 4) *environmental security*; 5) *personal security* 6) *community security* ; dan 7) *political security*.

Pandemi COVID-19 dan *human security*

Dengan merujuk konsep *human security* diatas, maka ketika muncul epidemi COVID-19 dan kemudian secara resmi oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi global, jelas telah membahayakan keselamatan manusia dan menimbulkan perasaan *insecure* terhadap penyakit mematikan tersebut. Dengan demikian, maka pandemi COVID-19 merupakan *threat (ancaman)*, terutama ancaman kesehatan (*health insecurity*), yang merupakan bagian dari persoalan human security, yang harus direspons dengan sektor kesehatan pula.

Terkait COVID-19 sebagai bencana kemanusiaan, PBB secara resmi telah meluncurkan Rencana Respons Kemanusiaan, dengan melakukan press release “UN and Partners Release Record Humanitarian Response Plan as COVID-19 Wreaks Havoc” di Jenewa pada 1 Desember 2020 (Lihat gambar 4). Pada kesempatan tersebut Sekretaris Jendral PBB António Guterres menyatakan bahwa “235 juta orang di seluruh dunia akan memerlukan bantuan kemanusiaan pada tahun 2021-meningkat 40 persen dalam setahun.” Dalam acara rencana aksi tersebut, Sekretaris Jendral PBB menyatakan : “Fifty-six countries affected by humanitarian crises and the fallout of the pandemic are included. The UN Secretary-General calls on the world to “stand with people in their darkest hour of need”. (Lima puluh enam

negara terkena krisis kemanusiaan dan dampak pandemi menyertai. Guterres menyerukan kepada dunia untuk “berdiri Bersama orang orang di saat saat tergelap mereka membutuhkan”.¹⁷

Gambar 4

Global Humanitarian Overview-Message by Secretary General António Guterres



Sumber : <https://youtu.be/3LxpbdB-4cY> , diakses 3 September 2021

Untuk implementasi lebih detail respons kemanusiaan terkait bencana COVID-19 tersebut, dapat dilihat pada The Global Humanitarian Overview 2021, di laman : <https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021>.

¹⁷

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO2021_Press%20Release_EN.pdf, diakses 2 September 2021

BAB III

PANDEMI COVID -19 : PERSPEKTIF KEAMANAN KESEHATAN (*HEALTH SECURITY*)

“in the coming years, unexpected new disease outbreaks will hit, and societies that proactively address these challenges are at the heart of secure nations and a safer world.

(United Nations Secretary-General Ban Ki-moon) ¹⁸

Menurut Colin McInnes, lebih dari 50 tahun, hubungan antara keamanan dan Kesehatan masih terbatas dan tidak terkait langsung: (yakni) konflik menyebabkan masalah Kesehatan. Dipahami bahwa masalah Kesehatan sebagai dampak langsung dari konflik (yang sebagian besar karena peperangan), dan (kaitan) tidak langsung , diantaranya adalah berdampak tidak dapat beroperasinya Rumah sakit karena kerusakan akibat perang.¹⁹

Namun pandangan ini mengalami pergeseran ketika di Eropa terjadi penyakit infeksi yang ditengarai dari perdagangan yang meningkat antara Eropa dengan negara lain di luar Eropa. Sehingga muncul pandangan bahwa penyakit sebagai ancaman yang harus ditangani melalui Kerjasama internasional dan harus ada pengaturan internasional. Dengan demikian, asal mula Kerjasama internasional terkait Kesehatan masyarakat (*public health*) terkait dengan keamanan, berasal dari Eropa pada abad 19. Namun, menurut

¹⁸ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/tag/health-security/>

¹⁹ Colin McInnes, “Health”, dalam Paul D Williams, *ibid*, hal 275.

McInnes, setelah Perang Dunia Kedua, kaitan (antara Kesehatan dan keamanan) tersebut mereda, karena 2 alasan, yakni kesehatan dipandang bukan sebagai isu keamanan, namun isu hak azasi manusia. Ini tampak pada konstitusi inisiatif WHO “Health for All” tahun 1970. Kedua, adanya pandangan bahwa penyakit infeksi disebabkan terutama karena pemakaian antibiotik.²⁰

Health security sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *human security*, menjadikan negara negara tidak dapat mengabaikan dan harus proaktif dalam menjalankannya. Dengan perspektif ini maka, *health security* merepresentasikan bagian integral keamanan individu dan terkait dengan karakteristik lain, yaitu keamanan ekonomi, politik, lingkungan, personal & komunitas.

Lantas apakah yang dimaksud dengan *health security* ? Menurut Commission on Human Security UNDP 2003, hal mendasar Health Security meliputi : *the protection against illness, disability and avoidable death*, dan bahwa health (sehat) bisa diartikan sebagai ‘not just the absence of disease’ (bukan hanya tidak adanya penyakit), tetapi sebagai : state of complete physical, mental and social wellbeing. (keadaan manusia yang menyeluruh baik fisik, mental dan sosial). *Health* (sehat) mencakup baik tujuan kesejahteraan fisik, namun juga kesejahteraan psikososial dan kepastian masa depan.²¹

Dari perspektif Konstruktivis yang digolongkan sebagai perspektif Keamanan Non Tradisional, maka sekuritisasi kesehatan memandang bahwa kesehatan

²⁰ Colin McInnes, *ibid*.

²¹ Craig A Snyder(ed), *Contemporary Security & Strategy*, New York : Palgrave Macmillan, 2008, hal 74.

dapat menjadi prioritas, sama halnya pembenaran alasan investasi pertahanan dan militer untuk keamanan negara. *Health security* juga menggarisbawahi hubungan erat antara konsep keamanan manusia dan keamanan nasional .

Pendekatan *health security* kemudian memastikan bahwa health security (keamanan Kesehatan) adalah merupakan 'barang publik yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi disini akan terkait dengan 2 komponen fundamental, yakni : *Empowerment* (pemberdayaan) dan *protection* (perlindungan).²²

1). *Empowerment* (Pemberdayaan) meliputi strategi-strategi peningkatan kapasitas individu dan masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap kesehatan mereka, sedangkan

2) *Protection* (Perlindungan), meliputi strategi-strategi yang mendorong 3 pilar pelembagaan masyarakat, yakni: untuk mencegah, memonitor dan mangantisipasi ancaman kesehatan.

Termasuk didalamnya adalah berbagai sektor dalam masyarakat dalam menegosiasi ancaman-ancaman kesehatan.

Dengan demikian, merujuk pada konsep *human security* diatas, maka pandemi COVID-19 telah menjadi ancaman Kesehatan bagi seluruh manusia di berbagai belahan dunia, membuat negara negara berupaya penuh menanganinya, termasuk didalam meluncurkan berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat terdampak, juga pengobatan, vaksinasi, pemakaman bagi yang meninggal dunia, yang ditanggung oleh negara,

²² Chen, dalam Craig A Snyder(ed), *ibid*, hal 75.

mengingat dalam cara pandang ini, adalah tugas negara untuk melakukan perlindungan (*protection*).

Di Indonesia, salah satu upaya perlindungan negara dalam penanganan COVID-19 antara lain tampak ketika pada tahun 2020 Kementerian Luar Negeri RI, melalui Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, melakukan reorientasi arah Politik Luar Negeri, dengan 'refocussing' pada :²³

- penguatan upaya perlindungan Warga Negara Indonesia,
- dukungan terhadap upaya penanggulangan pandemi baik dari aspek kesehatan maupun dampak sosial ekonomi, dan
- terus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia.

Menteri Luar negeri Retno L.P Marsudi, juga menyampaikan bahwa : “kita membutuhkan kepemimpinan global kolektif yang kuat: *Recover Together, Recover Stronger*”. Untuk itu, pada tahun 2021, diplomasi Indonesia akan difokuskan pada lima prioritas, yaitu:

1. Membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau Jaminan Kesehatan Nasional;
2. Mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau / berkelanjutan;
3. Penguatan sistem perlindungan warga negara Indonesia;

²³ Menlu RI sampaikan capaian politik luar negeri Indonesia 2020 dan prioritas diplomasi 2021, <https://kemlu.go.id/hanoi/id/news/10439/menlu-ri-sampaikan-capaian-politik-luar-negeri-indonesia-2020-dan-prioritas-diplomasi-2021>, diakses 3 September 2021

4. Terus berkontribusi dalam memajukan berbagai isu di kawasan dan dunia; dan
5. Melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dengan dua fokus utama, yaitu mengintensifkan perundingan perbatasan darat dan laut serta memperkuat upaya perlindungan keutuhan dan kedaulatan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya kerja sama global untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola kesehatan, ketahanan ekonomi, serta pentingnya multilateralisme. Untuk tetap dapat berkontribusi pada perubahan dunia, diplomasi Indonesia harus antisipatif, adaptif, dan gesit.

Demikian pula, Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) , sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir, menyampaikan program perlindungan pada World Economic Forum (WEF) Special Virtual on Indonesia. Melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 25 November 2020, Erick Tohir menyampaikan bahwa dalam penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia konsisten melakukan tiga hal. *Pertama*, pemerintah fokus pada penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dalam penanganan COVID-19. *Kedua*, penyediaan pekerjaan. *Ketiga*, pembukaan lapangan kerja untuk masa yang akan

datang. Karena itu program kerjanya ada tiga (yang) tadi saya sampaikan, Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Berkembang.²⁴

Untuk lebih mudahnya, program yang disampaikan Menteri Erick Tohir tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5

3 Fokus Utama Pemerintah Menangani Covid-19

merdeka.com

3 Fokus Utama Pemerintah Menangani Covid-19

2020 merdeka.com | sumber : World Economic Forum (WEF) Special Virtual on Indonesia, Rabu (25/10) | Menteri BUMN, Erick Tohir

Indonesia Sehat
Standarisasi dalam pengobatan covid-19, mencari solusi untuk vaksin agar vaksin ini juga bisa menekan kematian dan juga menekan penularan. Karena itu kita lakukan dengan konsisten.

Indonesia Bekerja
Pemerintah terus hadir dalam melakukan kemudahan kepada rakyat Indonesia. Yaitu memberi bantuan berupa bansos, subsidi gaji, ataupun BLT desa, ataupun program para kerja dll, karena kita ingin memastikan bahwa rakyat Indonesia bisa bekerja.

Indonesia Berkembang
Lapangan kerja yang akan disediakan di masa yang akan datang dengan melakukan Investasi seperti pembangunan Infrastruktur, pembangunan percepatan kawasan Industri, kawasan wisata, food estate, dan lain lain.

#PesanIbu : Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak

Sumber : INFOGRAFIS: Tiga Fokus Utama Pemerintah Menangani Covid-19, <https://www.merdeka.com/peristiwa/infografis-tiga-fokus-utama-pemerintah-menangani-covid-19.html>, diakses 2 September 2021.

²⁴ Di Forum WEF, Erick Tohir Jelaskan Tiga Fokus Indonesia Tangani Pandemi, <https://setkab.go.id/di-forum-wef-erick-tohir-jelaskan-tiga-fokus-indonesia-tangani-pandemi/>, diakses 2 September 2021.

BAB IV

PANDEMI COVID -19 : PERSPEKTIF LIBERALIS

No country is able to overcome this (COVID-19) crisis alone. In this connection, we have no other option but to count on the WHO to be platform of cooperation among countries (Menteri Luar Negeri , Retno Marsudi, 16 April 2020)

Pada awal munculnya studi Hubungan Internasional terdapat 2 paradigma yang mendominasi, yakni paradigma Realis dan paradigma Liberalis. Berbeda dengan Realis yang cenderung pesimis terhadap perdamaian dunia yang bersifat permanen, paradigma Liberalis lebih optimis bahwa perdamaian dunia dapat diupayakan antara lain dengan melakukan pengaturan, antara lain melalui organisasi internasional dan hukum internasional. Cara pandang ini terutama dianut oleh paradigma Liberalis institusionalis. Paradigma Liberalis optimis bahwa interdependensi (saling ketergantungan) dan Kerjasama akan menciptakan perdamaian.

Robert Keohane memandang Kerjasama terjadi ketika para aktor baik *nation states* maupun *non nation states actors* menyesuaikan preferensi perilaku mereka dengan pihak lain yang aktual dan diantisipasi melalui proses koordinasi kebijakan. Dalam Kerjasama terkandung dua elemen penting. *Pertama*, perilaku masing masing aktor diarahkan pada beberapa tujuan

bersama. *Kedua*, kerja sama memberi para pihak keuntungan atau imbalan yang menguntungkan²⁵

Jadi, cara pandang Liberalis ini lebih optimis terhadap terciptanya perdamaian melalui Kerjasama internasional. Mengapa? Karena terjadi interdependensi, sehingga terciptanya perdamaian akan menguntungkan pihak pihak yang melakukan Kerjasama, daripada konflik.

Sependapat dengan Keohane, Joseph Frankel berpendapat bahwa negara akan melakukan kerjasama jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada konsekuensi yang harus ditanggung. Adapun sifat dan tujuan kerjasama juga menentukan keberhasilan, yang biasanya ditentukan dari persamaan persamaan fundamental, yang dikenal dengan kerjasama fungsional.

Terkait tatanan dunia saat ini, Daniel Deudney dan G John Ikenberry, memandang terdapat 3 elemen dalam tatanan global saat ini : 1) Hukum dan perjanjian internasional berfungsi untuk menciptakan sistem internasional yang relatif adil. Misal PBB dengan pengeralahan sumberdaya untuk tujuan bersama, termasuk menyediakan sarana untuk diplomasi dan memberi hak semua negara untuk bersuara di komunitas internasional. Misal untuk masalah perubahan iklim; 2). Penyebaran perdagangan bebas dan kapitalisme melalui upaya negara negara liberal yang kuat dan organisasi internasional seperti WTO, IMF dan World Bank; 3). Adanya norma internasional yang

²⁵ Robert O Keohane “Cooperation and International Regimes” dikutip Dr Umar Suryadi Bakry, dari *Dasar Dasar Hubungan Internasional*, cetakan ke-1, Kencana, Depok, 2017, hal. 73

mendukung Kerjasama internasional, Hak Azasi Manusia, demokrasi dan supremasi hukum.²⁶

Meski masih menimbulkan kebingungan karena merupakan istilah yang digunakan diluar teori HI, salah satu varian dari Liberalisme adalah Neoliberalisme. Inti dari Neoliberalisme dalam Hubungan Internasional menurut Daniel Deudney, dkk adalah bahwa negara dapat memperoleh manfaat secara signifikan dalam kerja sama jika mereka saling mempercayai untuk memenuhi perjanjian mereka. Jika, pihak ketiga, seperti organisasi internasional dapat memantau perilaku penandatanganan perjanjian dan memberikan informasi kepada kedua belah pihak, dorongan untuk mencederai perjanjian dapat berkurang dan kedua pihak dapat berkomitmen untuk meningkatkan Kerjasama.²⁷

Meski ada asumsi dari teoritis Liberalis, bahwa negara lebih peduli pada keuntungan absolut daripada keuntungan relatif, namun dari perspektif tersebut ada optimisme terhadap peran Organisasi internasional, terutama dalam memelihara dan meningkatkan Kerjasama internasional.

Lantas apa kaitan Kerjasama internasional dengan Kesehatan Publik Global (Global Public Health) ? WHO mendefinisikan *Global Public Health* (Keamanan kesehatan masyarakat global) sebagai kegiatan yang

²⁶ Stephen McGlinchey, Rosie Walters & Christian Scheinpflug, *International Relations Theory*, terj Dr Takdir Ali Mukti, Dasar DAsAr Kajian Hubungan Internasional, Yogyakarta, Kumojoyo Press, 2020, hal. 26.

²⁷ Ibid, hal 27.

diperlukan, baik proaktif maupun reaktif, untuk meminimalkan bahaya dan dampak peristiwa kesehatan masyarakat akut yang membahayakan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah geografis dan batas-batas internasional.²⁸

Ancaman Kesehatan terbukti berdampak sangat luas dan merupakan isu baru yang tidak dapat diabaikan, membuat pemerintah harus melakukan berbagai penyesuaian penyesuaian serta memerlukan Kerjasama baik internal maupun eksternal dalam penanganannya. Disinilah pentingnya peran organisasi internasional yang kredibel untuk melakukan pengaturan.

Ketika Badan Kesehatan Dunia, WHO sudah mengumumkan epidemi berubah status menjadi pandemi global, maka pemerintah dan sistem kesehatan perlu memastikan kesiapan untuk menghadapinya. Dalam hal ini penanganan pandemi ketika sudah menjadi isu kesehatan global akan berimplikasi berbeda dengan kesehatan publik. Koplan membedakan isu kesehatan kedalam kategori kesehatan global, kesehatan internasional dan kesehatan publik. Tabel berikut akan memberikan ilustrasi perbedaan kesehatan publik dan kesehatan global. Koplan menengarai bahwa berbeda dengan kesehatan publik, kesehatan global mensyaratkan Kerjasama global dalam pengembangan dan penerapan solusinya.

²⁸ https://www.who.int/health-topics/health-security#tab=tab_1, diakses 12 Juli 2021

Tabel 1

Perbedaan Kesehatan Global dan Kesehatan Publik

	Kesehatan Global	Kesehatan Publik
Jangkauan Geografis	Fokus pada isu-isu baik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan yang dapat melampaui batas-batas nasional	Fokus pada isu-isu kesehatan pada satu komunitas atau negara
Level kerjasama	Pengembangan dan penerapan solusi membutuhkan Kerjasama global	Pengembangan dan penerapan solusi TIDAK membutuhkan Kerjasama global
Target individu populasi	Mencakup program pencegahan dalam populasi dan perawatan klinis individu	Sebagian besar difokuskan pada program pencegahan dan populasi
Akses Kesehatan	Tujuan utama adalah keadilan akses Kesehatan bagi semua negara dan masyarakat	Tujuan utama adalah keadilan dan Kesehatan dalam suatu negara atau komunitas
Rentang Disiplin Ilmu	Riset kesehatan global mencakup multidisiplin ilmu, tidak hanya ilmu kesehatan	Riset kesehatan publik mengedepankan pendekatan multidisiplin, namun lebih fokus pada ilmu kesehatan & ilmu sosial.

Sumber : diolah dari : Koplan et al, 2009, the Lancet dalam *Kesehatan untuk Semua : Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia*, PPPK-DEPLU RI, 2018 hal 3

Merujuk pada pendapat Koplan di atas, maka tampak jelas bahwa pada Kesehatan global, diperlukan Kerjasama global untuk pengembangan dan penerapan solusi.

Dengan demikian, maka Ketika epidemi COVID-19 secara resmi telah dinyatakan sebagai pandemi, yang berarti berskala global, maka tidak dipungkiri, perlu Kerjasama global dalam penanganannya. Jika dibuat diagram, maka tampak pada gambar 5 berikut.

Gambar 6

Keterkaitan Pandemi Global dan Kerjasama Internasional

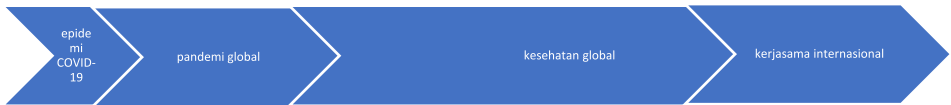


Diagram diatas menjelaskan rentetan bahwa epidemii COVID-19 yang penyebarannya semakin meluas, dan menjangkau hamper seluruh Kawasan di dunia, telah membuat WHO menetapkan sebagai pandemi global, dan diakui telah mempengaruhi kesehatan global. Karena karakter global adalah lintas batas negara dan dalam skala luas, maka diperlukan kerjasama internasional untuk efektifitas penanganannya.

Kerjasama internasional penanganan pandemi global COVID- 19 ini menjadi semakin krusial ketika beberapa negara maju telah berhasil memproduksi vaksin secara massal. Dilain pihak, terdapat kesenjangan ketersediaan vaksin, dan kemampuan memperolehnya antara negara maju dan negara berkembang.

Berikut beberapa pernyataan pemimpin dunia yang berkomitmen bekerjasama mengatasi Pandemi COVID-19, dan memastikan tidak ada negara yang tertinggal dalam menangani pandemi COVID-19.

Pernyataan dari Pemimpin Negara G-7

G7 leaders' Statement on COVID-19 We, the Leaders of the Group of Seven, acknowledge that the COVID-19 pandemic is a human tragedy and a global health crisis, which also poses major risks for the world economy. We are committed to doing whatever is necessary to ensure a strong global response through closer cooperation and enhanced coordination of our efforts.²⁹

Pidato Presiden China Xi Jinping pada Health Global Summit, 21 Mei 2021

....Many important common understandings were reached on promoting global solidarity against the virus and boosting world economic recovery. ... Here, I want to make five points on what we need to do.

First, we must put people and their lives first.

Second, we must follow science-based policies and ensure a coordinated and systemic response.

Third, we must stick together and promote solidarity and cooperation.

Fourth, we must uphold fairness and equity as we strive to close the immunization gap

²⁹ <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/g7-leaders-statement-on-covid-19/>, diakses 5 Juli 2021

Fifth, we must address both the symptoms and root causes as we improve the governance system.³⁰

Pernyataan resmi Presiden Amerika Serikat, Joe Biden

None of us face this threat alone, which is why the United States—through USAID—is leading the world as the largest single donor to Gavi, the vaccine alliance, in support of COVAX...

Additionally, under the American Rescue Plan Act of 2021, the U.S. government is spending nearly \$11 billion in foreign assistance to fight COVID-19, address secondary impacts of the pandemic, and strengthen the global health security architecture.³¹

Berbagai pernyataan diatas, mengakui pentingnya kerjasama global dalam benacana kemanusiaan pandemi COVID-19 ini.

³⁰ http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/21/c_139961512.htm, diakses 5 Juli 2021

³¹ Covid-19 Recovery, <https://www.state.gov/covid-19-recovery/>

BAB V DIPLOMASI KESEHATAN DAN PANDEMI COVID -19 :

PENGALAMAN INDONESIA

The Foreign Affairs Ministry and the Indonesian diplomacy will continue to work, work, and work, to secure Indonesia's vaccine supply from all channels through every available mechanism. The Indonesian diplomacy will keep working, among others, to voice out that vaccine equity for all countries can be achieved," (Foreign Affairs Minister Retno Marsudi)³²

Ketika pandemi COVID-19 melanda, negara negara berupaya keras mengatasinya, termasuk 'berlomba' melakukan berbagai penelitian untuk inovasi vaksin COVID-19 dan kemudian memproduksi vaksin secara massal. Dilain pihak, pada saat bersamaan, virus corona-2 penyebab COVID-19 sangat mudah menyebar dan membuat negara negara harus melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk mengatasinya, terutama untuk menghambat persebarannya. Akibatnya, ketika beberapa negara berhasil memproduksi vaksin tersebut, semua negara berupaya keras memperolehnya. Hal ini tidak mudah, mengingat *demand* yang tinggi, dan *supply* yang terbatas. Selain itu juga ada indikasi pengamanan stok vaksin oleh negara negara kaya, sehingga makin terjadi ketimpangan untuk akses terhadap vaksin. Untuk ini, India dan Afrika Selatan berupaya mewacanakan penyesuaian TRIP's dalam terkait

³²Indonesia Continues Calls for Vaccine Equity, <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-continues-calls-for-vaccine-equity>, diakses 11 September 2021

vaksin. Hal ini juga kemudian dipertegas Indonesia melalui pidato presiden pada pidato di depan Majelis Umum September 2021 lalu.

Dengan demikian, maka kemampuan diplomasi, dalam hal ini diplomasi Kesehatan, dan diplomasi vaksin khususnya, membawa tantangan tersendiri. Hal ini antara lain diakui pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam acara Vaksinasi KATGAMA Peduli, yang antara lain menyatakan :” Sangat tidak mudah mencari vaksin. Sampai saat ini jumlah pasokan vaksin dunia dengan permintaannya, tidak sebanding. Selain itu juga terdapat hambatan berupa kebijakan sejumlah negara yang menghambat ekspor vaksin ke luar negeri. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara negara negara berpenghasilan tinggi dengan negara berpenghasilan rendah.”³³

³³ Menlu: Diplomasi Terus Berjalan untuk Cukupi Kebutuhan Vaksin, https://ugm.ac.id/id/berita/21664-menlu-diplomasi-terus-berjalan-untuk-cukupi-kebutuhan-vaksin?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR00N8GOazrPL4XTp7Ub3UXXH6K1_nVCtmFj_isw4fkzEiwSvdO2-Gy-HHw, diakses 15 September 2021.

Gambar 7

Menlu Retno Marsudi Memberi Keterangan Pemenuhan Vaksin di GSP



Foto : Dok Humas UGM, <https://yogya.inews.id/berita/penuhi-kebutuhan-vaksin-di-dalam-negeri-pemerintah-terus-lakukan-diplomasi>, diakses 21 September 2021.

Diplomasi vaksin merupakan bagian diplomasi Kesehatan. Istilah diplomasi Kesehatan awalnya diperkenalkan asisten khusus presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter untuk masalah Kesehatan, Peter Bourne. Menurut Bourne, Kesehatan dan kedokteran dapat memainkan peran penting sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan internasional.³⁴

Dalam beberapa tahun terakhir, diplomasi kesehatan telah berkembang menjadi bidang studi mapan yang lebih dikenal sebagai diplomasi kesehatan global. Perkembangan studi ini didorong oleh munculnya kesadaran bahwa saat ini makin banyak masalah kesehatan yang berimplikasi luas baik pada

³⁴ Seow Ting Lee, Vaccine diplomacy: Nation Branding and China's COVID-19 soft power play, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8259554/>, diakses 15 September 2021.

bidang politik, sosial, dan ekonomi yang melampaui batas-batas nasional, serta memerlukan kekuatan global untuk melakukan tindakan yang menentukan kesehatan warga (Kickbusch et al. 2007).³⁵

Diakui WHO, dalam situasi pandemi, dimana penanganannya mengharuskan Kerjasama global, maka peran diplomasi Kesehatan menjadi semakin vital. Dengan kata lain, Kesehatan menjadi elemen penting dalam kebijakan luar negeri, kebijakan keamanan, strategi pembangunan dan perjanjian perdagangan, terkait dengan pembuat kebijakan Luar Negeri, pembuat kebijakan di bidang Kesehatan, sehingga memerlukan ketrampilan baru untuk bernegosiasi bagi Kesehatan dibanding elemen lainnya. Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup hanya diselesaikan secara teknis saja, tetapi juga memerlukan negosiasi politik, dengan melibatkan banyak aktor.³⁶ Lebih lanjut menurut WHO, diplomasi Kesehatan global (*global health diplomacy/GHD*), berfokus pada masalah kesehatan yang membutuhkan kerja sama banyak negara untuk menangani masalah yang menjadi perhatian bersama, namun diplomasi kesehatan juga dapat memainkan peran sentral di tingkat regional, bilateral dan nasional.³⁷

Joshua Goldstein memandang Healthy Regime sebagai seperangkat aturan, norma dan prosedur, yang tidak harus selalu dikodifikasi dalam Lembaga, yang mengatur perilaku actor hubungan internasional. Rezim Kesehatan dunia (World health regime, mencakup negara, organisasi internasional seperti

³⁵ Seow Ting Lee, *ibid.*

³⁶ WHO, Policy Brief : Health Diplomacy, <http://applications.emro.who.int>, diakses 21 September 2021

³⁷ WHO, *ibid.*

Gates Foundation, dan lain lainnya, yang bekerjasama dengan harapan (ekspektasi) yang sama tentang aktifitas untuk mengembangkan kesehatan dan stem epidemi.³⁸

Merujuk pada pengertian diatas, maka ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk segera bergabung dalam skema COVAX untuk memastikan akses mendapatkan vaksin sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 merupakan keputusan yang sangat tepat. Demikian pula, dalam implementasinya, terdapat sinergi antara Departemen Kesehatan dan Departemen Luar Negeri, sehingga diplomasi Kesehatan, dan terutama diplomasi vaksin dapat berjalan efektif. Hal ini tampak dari banyaknya negara negara yang berkomitmen bekerjasama dengan Indonesia dalam pengadaan vaksin COVID 19, baik melalui skema bilateral maupun multilateral melalui COVAX. Keberhasilan Indonesia dalam mengatasi pandemi dengan mulai terbentuknya herd immunity, yang dilakukan dengan program vaksin yang massif antara lain diakui Perdana Menteri Italia dan World Bank. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyampaikan, dalam Pertemuan Menteri Kesehatan G20 di Roma 5-6 September 2021, banyak negara yang memuji penurunan kasus positif COVID-19 di Indonesia, bahkan menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Perdana Menteri Italia Roberto Speranza terkejut Ketika mengetahui Indonesia berhasil dalam menyuntikkan 108 juta dosis vaksin kepada 69 juta orang di Indonesia, yang angka ini

³⁸ Joshua Goldtein, *International Relations*, chp3 PPT, Pearson, 2014

melebihi penduduk Italia, 57 juta jiwa.³⁹ Pengakuan terhadap keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi melalui pemberian vaksin juga disampaikan World Bank. Sebagaimana diketahui, World Bank merupakan Lembaga pertama yang menawarkan pembiayaan darurat untuk respons COVID-19 di Indonesia. World Bank mengapresiasi keberhasilan Indonesia yang telah mengalokasikan US\$ 14,9 miliar untuk respons Kesehatan, dan menjadi salah satu negara pertama yang di dunia yang mengumumkan vaksinasi gratis untuk orang dewasa. Indonesia, menurut World Bank, dengan penduduk sekitar 270 juta dan geografi kepulauan yang menantang, menjadi salah satu dari hanya tujuh negara yang mencapai prestasi tersebut. Menurut World Bank keberhasilan Indonesia terutama karena 2 hal : 1) Tindakan tepat waktu dan tegas (Timely and decisive action)– Indonesia menyadari pentingnya vaksinasi tepat waktu untuk mengurangi dampak pandemi dan bekerja cepat untuk mendapatkan vaksin yang cukup bagi penduduknya segera setelah tersedia. Sementara kekurangan vaksin global telah menjadi masalah utama bagi negara-negara lain, Indonesia telah mampu mengamankan pasokan yang stabil dan secara signifikan meningkatkan program vaksinasinya. 2) Pembiayaan yang adaptif, memadai, dan fleksibel (Adaptive, adequate, and Flexible Financing) –yakni, Mengkoordinasikan sumber daya untuk memerangi pandemi itu mahal, kompleks, dan dinamis, karena prioritas terus berubah. Pemerintah (Indonesia) telah membuat komitmen yang signifikan untuk sektor kesehatan, untuk pemulihan ekonomi, dan terhadap mitigasi dampak sosial, yang sejauh ini berjumlah lebih dari

³⁹ Menkes Sebut Penanganan COVID-19 di Indonesia Dipuji Neagara lain, <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-sebut-penanganan-covid-19-di-indonesia-dipuji-negara-lain.html>, diakses 11 September 2021

US\$50 miliar. Komitmen ini telah diperoleh dari anggaran pemerintah melalui prioritas ulang, dan juga dengan memobilisasi sumber daya eksternal.⁴⁰

Salah satu indikator keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 adalah karena mampu menurunkan kasus COVID-19 hingga 58% dalam kurun waktu 2 minggu.⁴¹

Untuk memastikan pengaturan pemerataan vaksin, yang memungkinkan negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah mendapat akses vaksin yang setara dengan negara-negara maju, WHO Bersama Komisi Eropa dan pemerintah Perancis pada April 2020 meluncurkan 3 (tiga) Access to COVID-19 Tools Accelerator. Akses tersebut meliputi baik, untuk tes, pengobatan (terapi) dan vaksin COVID-19. Adapun akses untuk mendapatkan vaksin melalui skema COVID-19 Vaccines Global Access atau yang disingkat COVAX, merupakan inisiatif yang diarahkan GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), WHO dan UNICEF. Skema ini memungkinkan kolaborasi lintas sektor baik nation maupun non nation states actor, yakni organisasi Kesehatan tingkat dunia, produsen, ilmuwan, sector private, Lembaga social dan filantropis.

⁴⁰ Indonesia has Passed 100 million COVID-19 vaccines doses, what can we learned, <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/indonesia-has-passed-100-million-covid-19-vaccine-doses-what-can-we-learn?fbclid=IwAR0KKhGi7LQugrh4nEI08qp7yk8bxZKOSWA4pdp3vP5c63oPLF1YnwmK0UU>, diakses 21 September 2021

⁴¹ <https://www.facebook.com/KementerianKesehatanRI>, diakses 21 September 2021

Diplomasi multilateral Indonesia dengan segera bergabung dalam skema COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) merupakan keputusan yang tepat. COVAX mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 bulan Februari 2021, dan pada 8 Maret 2021, Indonesia menerima tahap pertama bantuan vaksin 1,113.000 dosen AstraZeneca. Indonesia menerima komitmen dari vaksin COVID-19 dari COVAX sebesar 20 persen penduduk dengan anggaran sepenuhnya ditanggung COVAX. Keberhasilan mengamankan pasokan vaksin tidak lepas dari upaya diplomasi Indonesia sejak Oktober 2020 yang dipimpin Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN. WHO Representative Dr N Paranietharan juga mengakui Indonesia merupakan satu dari sedikit negara negara berkembang yang sudah memulai vaksinasi. DR Paranietharan juga mengakui kepemimpinan Indonesia dalam vaksin multilateral dengan terpilihnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai co chair COVAX AMC Engagement Group. Apresiasi juga disampaikan Country Representative UNICEF Indonesia, Debora Comini yang mengapresiasi Indonesia sebagai negara pertama kali bergabung di COVAX . Indonesia juga terdepan dalam memastikan untuk membuat kesepakatan suplai vaksin.⁴²

Indonesia telah mendapat vaksin, yang awalnya ditandai dengan penyuntikan perdana vaksin COVID-19 terhadap presiden Joko Widodo. Keberhasilan Indonesia mendapat akses vaksin COVID-10 untuk jalur multilateral dimulai dari pengiriman surat expression of interest kepada GAVI-COVAX Facility oleh

⁴² Buah Diplomasi Vaksin, Indonesia Terima Kedatangan Pertama Vaksin dari COVAX sebanyak 1,1 Juta Dosis, <https://covid19.go.id/p/berita/buah-diplomasi-vaksin-indonesia-terima-kedatangan-pertama-vaksin-dari-covax-sebanyak-11-juta-dosis>, diakses 21 September 2021

pemerintah Indonesia kepada yang pada 16 Oktober 2020 di Jenewa yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Bersama Menteri BUMN. Gelombang pertama pengiriman vaksin skema multilateral ini dengan datangnya 1.113.600 vaksin AstraZeneca pada 8 Maret 2021.

Vaksin tersebut diperoleh melalui skema Kerjasama multilateral pemerintah Indonesia dengan Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI), WHO, UNICEF, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), serta pihak lain, melalui inisiatif fasilitas COVAX yang bertujuan untuk mengupayakan kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19 untuk seluruh dunia.⁴³ Diresmikan 4 Juni 2020, saat ini anggota COVAX ada 180 negara dan Lembaga. COVAX, pilar vaksin dari Accelerator Access to COVID-19 Tools (ACT), dipimpin bersama oleh Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), Gavi, Vaccine Alliance, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) – bekerja di kemitraan dengan produsen vaksin negara maju dan berkembang. Ini adalah satu-satunya inisiatif global yang bekerja sama dengan pemerintah dan produsen untuk memastikan vaksin COVID-19 tersedia di seluruh dunia baik untuk negara berpenghasilan tinggi maupun negara berpenghasilan rendah⁴⁴ Bergabungnya Indonesia di COVAX, dimulai dari surat resmi GAVI kepada presiden RI Joko Widodo, tanggal 18 September 2020, bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang layak menerima Official Development Assistance (ODA) dalam COVAX Advanced Market Commitment (AMC) untuk penyediaan

⁴³ Presiden RI

⁴⁴ 172 countries and multiple candidate vaccines engaged in COVID-19 vaccine Global Access Facility, <https://www.who.int/news/item/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility>, diakses 21 September 2021

vaksin COVID-19 dalam kerangka multilateral. Melalui surat tersebut GAVI juga mengharap Kerjasama dengan Indonesia dalam menangani COVID-19. Indonesia melalui surat resmi Expression of Interest menyatakan kesediaan untuk bergabung dalam COVAX -AMC, yang disampaikan melalui Direktur WHO Tedros Ghebreyesus, dimana Menlu juga menyatakan kesediaan untuk mendukung Kerjasama multilateral terkait masalah vaksin.⁴⁵

Gambar 8

Daftar Negara yang layak mendapat bantuan vaksin COVID-19 dari COVAX AMC



⁴⁵ Menlu: Indonesia Bergabung dalam COVAX AMC, <https://mediaindonesia.com/internasional/353486/menlu-indonesia-bergabung-dalam-covax-amc>, diakses 21 September 2021.

https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/pr/COVAX_CA_COIP_List_COVAX_PR_12-05-21.pdf, diakses 21 September 2021

Gambar 9

Twitter Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah terpilih sebagai co chairman
COVAX AMC



https://twitter.com/Menlu_RI/status/1349154210714042369?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1349154210714042369%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kompas.com%2Ftren%2Fread%2F2021%2F01%2F13%2F163000065%2F

Terpilihnya Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sebagai Wakil ketua COVAX AMC di Jenewa 13 Januari 2021 selain menunjukkan kepercayaan terhadap kepemimpinan Menteri Luar Negeri RI tersebut, sekaligus menunjukkan

kepercayaan terhadap peran Indonesia dalam memimpin Kerjasama mengatasi pandemic COVID-19.

Sebagai upaya untuk membentuk kekebalan komunitas (herd immunity), maka pemberian vaksin menjadi keharusan. Menurut WHO, jika masyarakat, terutama berpenghasilan rendah dan menengah tidak divaksin, maka akan menjadi tempat berkembang biak SARS -Cov-2, virus corona penyebab COVID-19, menjadi tidak terkendali dan memungkinkan bermutasi menjadi varian yang lebih ganas. Dilain pihak, menurut Menteri Luar Negeri retno Marsudi, 80% dari 5,5 miliar suntikan vaksin COVID-19 yang dikirim ke seluruh dunia sejauh ini berada di neagara negara berpenghasilan menengah dan tinggi, yang telah bergerak lebih awal mengamankan pasokan vaksin dari produsen.⁴⁶

Selain skema multilateral melalui COVAX, Indonesia juga melakukan Kerjasama bilateral untuk mendapatkan vaksin. Skema bilateral antara lain dilakukan Indonesia dengan Belanda, Perancis, Amerika Serikat, Jepang dan Australia. dimana Belanda berkomitmen memberi bantuan vaksin 3.000.000 dosis sebagai upaya memperkuat kerjasama bilateral dan mengatasi pandemi COVID-19. Hal ini tampak pada pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns pada saat penyerahan bantuan vaksin dari Belanda ke Indonesia.

Pernyataan Retno Marsudi : “On behalf of the Indonesian government, I would like to thank the Dutch government for the vaccine assistance [under

⁴⁶ Ibid, diakses 21 September 2021

this] dose-sharing [mechanism]. I hope for an even stronger partnership in the future,".⁴⁷ (

Adapun pernyataan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns, sebagai berikut :” through this vaccine assistance, the Netherlands hoped to show its solidarity with Indonesia and strengthen its bilateral ties. And just like Indonesia, the Netherlands is also calling for equitable access for everyone in the world ⁴⁸

Selain kerjasama dengan Belanda, Tiongkok berkomitmen juga untuk mengekspor hampir 100 juta dosis vaksin ke Indonesia, baik dalam bentuk produk jadi ataupun larutan stok. Indonesia dan Tiongkok bekerjasama aktif dalam pengujian, penelitian, pengembangan dan pengadaan produksi vaksin.⁴⁹ Selain melalui skema bilateral, pemerintah Tiongkok juga berkomitmen memberi bantuan vaksin melalui skema multilateral COVAX.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah saat ini di seluruh dunia 5,5 miliar dosis vaksin telah disuntikkan. Tetapi 80 persen dari jumlah tersebut dimiliki negara berpenghasilan tinggi . Namun menurut Menteri Luar negeri Retno Marsudi. berdasar jumlah dosis, Indonesia menjadi negara keempat terbesar di Asia setelah Tiongkok, India dan Jepang. Indonesia saat ini telah melampui

⁴⁷ <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-receives-janssen-vaccine-from-the-netherlands-and-first-delivery-from-frances-dosesharing>, diakses 20 September 2021

⁴⁸ Indonesia Continues Calls for Vaccine Equity, <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-continues-calls-for-vaccine-equity>, diakses 21 September 2021.

⁴⁹ Xiao Qian, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, menerbitkan artikel di Media Indonesia : Awal Seratus Tahun yang Baru untuk Memulai Kerjasama yang Baru, <http://id.china-embassy.org/indo/xwdt/t1888666.htm>, diakses 21 September 2021

target . *Positivity rate* dibawah angka 5%, dibawah ambang batas WHO. *Positivity rate* kita 3,5%. Saat ini 113,6 juta dosis vaksin COVID.⁵⁰ Gambar 6 berikut menunjukkan vaksin yang sudah dikirim ke Indonesia.

Gambar 10
Vaksin Yang sudah dikirim ke Indonesia



Sumber : <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-receives-janssen-vaccine-from-the-netherlands-and-first-delivery-from-frances-dosesharing>

⁵⁰ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5719397/diplomasi-jadi-strategi-menlu-penuhi-kebutuhan-vaksin-corona-indonesia>, diakses 12 September 2021

Keberhasilan Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 banyak mendapat apresiasi. Namun meski demikian, tantangan ke depan juga masih banyak hal yang harus dilakukan pemerintah Indonesia. Hal ini seperti disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi yang juga sebagai Ketua ASEAN Health Ministers Meeting . Ketika tampil sebagai pembicara “Lesson Learnt from Managing the COVID Pandemic in ASEAN” pada acara Special Ministerial Conference for ASEAN Digital Public Health, dengan tema “Collaborative for Happier and Healthier World Post Pandemic” pada 6 Oktober 2021. Pada acara tersebut Menteri Kesehatan Budi Gunardi, menyampaikan pentingnya pemanfaatan platform data pengawasan Terpadu di ASEAN dan global, saling berbagi informasi dan data yang cepat untuk menanggapi ancaman Kesehatan masyarakat di masa depan.⁵¹ Kegiatan yang mempertemukan para pembuat kebijakan dari sector Kesehatan dan ekonomi di negara negara anggota ASEAN, badan sectoral ASEAN terkait Sekretaris Jenderal, Organisasi Internasional , maupun Organisasi internasional Non Pemerintah (INGO) serta universitas, menunjukkan bahwa penanganan pandemic menunjukkan urgensi kerjasama multilateral dalam penanganannya.

⁵¹ <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/4038678/transformasi-digital-bidang-kesehatan-strategi-jangka-panjang-atasi-pandemi-covid-19/>, diakses 11 Oktober 2021

DAFTAR PUSTAKA

Merriam webster dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/pandemic>, diakses 27 April 2021

Heath Kelly, The classical definition of a pandemic is not elusive ,*Bulletin of the World Health Organization* 2011;89:540-541. doi: 10.2471/BLT.11.088815),
<https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-088815/en/#:~:text=A%20pandemic%20is%20defined%20as,are%20not%20considered%20pandemics.>, diakses 27 April 2021

WHO warns Covid-19 pandemic is not necessarily the big one,
<https://www.theguardian.com/world/2020/dec/29/who-warns-covid-19-pandemic-is-not-necessarily-the-big-one>, diakses 6 Mei 2021

Presiden Jokowi Siapkan Transisi dari Pandemi ke Endemi,
<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-siapkan-transisi-dari-pandemi-ke-endemi/>, diakses 10 September 2021

Lesson 1: Intruduction to Epidemology: Section 11: Epidemic Disease Occurrence,

<https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/lesson1/section11.html>, diakses 4/5/2021

<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, diakses 6 Juli 2021

<https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/>, diakses 4 Juli 2021.

<https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2020/09/United-Nations-Human-Security-Newsletter-Summer-2020-min.pdf>, diakses 4 Juli 2021

Paul D Williams, *Security Studies: An Introduction*, Routledge London & New York, 2008

The concept of securing Human Security,
https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2011/html/honbun/b2/s2_1.html

Yes, the UN has a duty to intervene. But, when, where and how?
<https://www.theguardian.com/world/2013/may/04/un-syria-duty-to-intervene>, diakses 2 September 2021

Paul D Williams & Matt McDonald(eds), *Security Studies An Introduction*, 3rd ed, Routledge, London & New York, 2018

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO2021_Press%20Release_EN.pdf, diakses 3 September 2021

<https://youtu.be/3LxpbdB-4cY> , diakses 3 September 2021

<https://www.unocha.org/global-humanitarian-overview-2021>, diakses 3 September 2021

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/tag/health-security/> , diakses 3 September 2021

Craig A Snyder(ed), *Contemporary Security & Strategy*, New York : Palgrave Macmillan, 2008

Menlu RI sampaikan capaian politik luar negeri Indonesia 2020 dan prioritas diplomasi
2021,<https://kemlu.go.id/hanoi/id/news/10439/menlu-ri-sampaikan-capaian-politik-luar-negeri-indonesia-2020-dan-prioritas-diplomasi-2021>, diakses 2 September 2021

Di Forum WEF, Erick Tohir Jelaskan Tiga Fokus Indonesia Tangani Pandemi,
<https://setkab.go.id/di-forum-wef-erick-thohir-jelaskan-tiga-fokus-indonesia-tangani-pandemi/>, diakses 2 September 2021.

INFOGRAFIS: Tiga Fokus Utama Pemerintah Menangani Covid-19, <https://www.merdeka.com/peristiwa/infografis-tiga-fokus-utama-pemerintah-menangani-covid-19.html>, diakses 2 September 2021.

Dr Umar Suryadi Bakry, dari *Dasar Dasar Hubungan Internasional*, cetakan ke-1, Kencana, Depok, 2017

Stephen McGlinchey, Rosie Walters & Christian Scheinplug, *International Relations Theory*, terj Dr Takdir Ali Mukti, *Dasar Dasar Kajian Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Kumojoyo Press, 2020

https://www.who.int/health-topics/health-security#tab=tab_1, diakses 12 Juli 2021

Kesehatan untuk Semua : Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia, PPPK-DEPLU RI, 2018

<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/16/g7-leaders-statement-on-covid-19/>, diakses 5 Juli 2021

http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/21/c_139961512.htm, diakses 5 Juli 2021

Covid-19 Recovery, <https://www.state.gov/covid-19-recovery/> Indonesia Continues Calls for Vaccine Equity, <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-continues-calls-for-vaccine-equity>, diakses 11 September 2021

<https://yogya.inews.id/berita/penuhi-kebutuhan-vaksin-di-dalam-negeri-pemerintah-terus-lakukan-diplomasi>, diakses 21 September 2021.

Menlu: Diplomasi Terus Berjalan untuk Cukupi Kebutuhan Vaksin, https://ugm.ac.id/id/berita/21664-menlu-diplomasi-terus-berjalan-untuk-cukupi-kebutuhan-vaksin?utm_source=divr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR00N8GQazrPL4XTp7Ub3UXXH6K1_nVctmFj_isw4fkzEiwSvdO2-Gy-HHw, diakses 15 September 2021.

Seow Ting Lee, Vaccine diplomacy: Nation Branding and China's COVID-19 soft power play,

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8259554/>, diakses 15 September 2021.

WHO, Policy Brief : Health Diplomacy, <http://applications.emro.who.int>, diakses 21 September 2021

Joshua Goldtein, *International Relations*, chp3 PPT, Pearson, 2014

Menkes Sebut Penanganan COVID-19 di Indonesia Dipuji Neagara lain, <https://www.merdeka.com/peristiwa/menkes-sebut-penanganan-covid-19-di-indonesia-dipuji-negara-lain.html>, diakses 11 September 2021

Indonesia has Passed 100 million COVID-19 vaccines doses, what can we learned, <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/indonesia-has-passed-100-million-covid-19-vaccine-doses-what-can-we-learn?fbclid=IwAR0KKhGi7LQugrh4nEI08qp7yk8bxZKOSWA4pdp3vP5c63oPLF1YnwmKOUU>, diakses 21 September 2021

¹ <https://www.facebook.com/KementerianKesehatanRI>, diakses 21 September 2021

Buah Diplomasi Vaksin, Indonesia Terima Kedatangan Pertama Vaksin dari COVAX sebanyak 1,1 Juta Dosis, <https://covid19.go.id/p/berita/buah-diplomasi-vaksin-indonesia-terima-kedatangan-pertama-vaksin-dari-covax-sebanyak-11-juta-dosis>, diakses 21 September 2021

172 countries and multiple candidate vaccines engaged in COVID-19 vaccine Global Access Facility, <https://www.who.int/news/item/24-08-2020-172-countries-and-multiple-candidate-vaccines-engaged-in-covid-19-vaccine-global-access-facility>, diakses 21 September 2021

https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/pr/COVAX_CA_COIP_List_COVAX_PR_12-05-21.pdf, diakses 21 September 2021

https://twitter.com/Menlu_RI/status/1349154210714042369?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1349154210714042369%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kompas.com%2Ftren%2Fread%2F2021%2F01%2F13%2F163000065%2F

<https://jakartaglobe.id/news/indonesia-receives-janssen-vaccine-from-the-netherlands-and-first-delivery-from-frances-dosesharing>, diakses 20 September 2021

Indonesia Continues Calls for Vaccine Equity, <https://jakartaglobe.id/news/indonesia-continues-calls-for-vaccine-equity>, diakses 21 September 2021.

¹ Xiao Qian, Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, menerbitkan artikel di Media Indonesia : Awal Seratus Tahun yang Baru untuk Memulai Kerjasama yang Baru, <http://id.china-embassy.org/indo/xwdt/t1888666.htm>, diakses 21 September 2021

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5719397/diplomasi-jadi-strategi-menlu-penuhi-kebutuhan-vaksin-corona-indonesia>, diakses 12 September 2021

<https://jakartaglobe.id/news/indonesia-receives-janssen-vaccine-from-the-netherlands-and-first-delivery-from-frances-dosesharing>

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/4038678/transformasi-digital-bidang-kesehatan-strategi-jangka-panjang-atasi-pandemi-covid-19/>, diakses 11 Oktober 2021

Biodata Penulis



Erna Kurniawati, merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional -UPN “Veteran” Yogyakarta. Menyelesaikan studi S-1 di Jurusan Ilmu Hubungan -Universitas Gadjah Mada, dan pasca sarjana (S-2) Ilmu Politik - Universitas Gadjah Mada. Bersama tim telah menulis beberapa buku diantaranya Pengantar Sosiologi, Diplomasi Publik Digital, Menulis Artikel dan Publikasi Ilmiah.



Ludiro Madu telah mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Yogyakarta sejak 1996. Penulis pernah mengikuti pelatihan tentang Nasionalisme di Central European University, Budapes, Hungaria (2008); pelatihan tentang Perdamaian dan Resolusi Konflik di Uppsala University, Uppsala, Swedia (2009). Minat studi penulis adalah studi ASEAN, Politik Luar Negeri (PLN), & Diplomasi Indonesia, serta kaitan antara hubungan internasional dan internet. Aktif menulis di harian Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta) dan Suara Merdeka (Semarang). Sejak work from home, mencoba lebih aktif menulis di beberapa media online, seperti: geotimes (<https://geotimes.co.id/author/ludiriomadu/>), qureta (https://www.quireta.com/next/profile/1015951209_1725646), Kompasiana (<https://www.kompasiana.com/ludiro>)



Munculnya epidemi COVID-19 yang kemudian oleh World Health Organization (WHO) ditetapkan sebagai pandemi global membawa tantangan baru bagi studi Ilmu Hubungan Internasional. Menjadi menarik untuk mengamati perilaku negara dalam merespons pandemi COVID-19 tersebut, mengingat pandemi global ini berdampak dalam hampir semua aspek. Buku Pandemi COVID-19 Perspektif ini berisi beberapa perspektif dalam hubungan internasional, diantaranya perspektif Liberalis dalam mengamati kerjasamanya, kemudian perspektif Keamanan Kesehatan (Health Security) dan Keamanan Manusia (Human Security). Buku ini ditutup dengan studi kasus Indonesia dalam Menangani pandemi COVID-19 melalui Kerjasama internasional. Hal ini mengingat Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang berhasil menangani pandemic COVID-19

Besar harapan kami, pemahaman mahasiswa mengenai pandemi COVID-19 dari Perspektif Hubungan Internasional meningkat, sehingga mendorong mereka melakukan penelitian dan membuat tugas akhir (skripsi) dengan topik diatas, sehingga semakin memperkaya studi Hubungan Internasional, terutama dalam memahami pandemi global.

LPPM UPN Veteran Yogyakarta

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur,
Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 486188,486733, ext 154
Fax (0274) 486400

ISBN 978-623-5539-79-9

